

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan pendidikan didalam masyarakat, sekarang ini sudah begitu rupa meluap dan memekarnya. Luapan dan memekarnya kebutuhan tersebut, memang erat hubungannya dengan kesadaran pendidikan yang semakin kuat didalam masyarakat, disamping itu juga karena perkembangan menyeluruh didalam masyarakat yang semakin lama semakin cepat, seperti perkembangan ilmu dan teknologi, perkembangan ekonomi, perkembangan penduduk serta perkembangan lingkungan alamiah. UUD 1945 mengamanatkan kepada semua warga negara untuk memberantas buta aksara sesuai dengan tujuan Negara yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Juga terdapat pada Bab XIII Pendidikan dan Kebudayaan pasal 31 ayat 1 yang berbunyi Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.

Namun kenyataannya masih banyak warga Negara yang buta aksara, seperti halnya data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Mamasa pada tahun 2010, jumlah warga buta aksara usia 15-59 tahun, sebanyak 10.626 jiwa (*sumber : bindikmas.kemdikbud.go.id/buta_aksara*) Itu berarti bahwa pemerintah belum bisa mencapai tujuan tersebut. Walaupun sudah dilakukan upaya-upaya untuk memberantas buta aksara, tetapi buta aksara masih banyak, karena terdapat banyak kendala-kendala yang dihadapi, misalnya mereka yang buta aksara itu tidak mau belajar membaca, menulis, berhitung serta berkomunikasi. Buta aksara merupakan jendela untuk melihat dunia. Artinya, jika orang bisa membaca, dia melihat dunia baru dan segala perkembangannya, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks) serta teknologi informasi (TI).

Buta aksara yang ada di Indonesia sebenarnya telah ada sejak zaman penjajahan. Dari pihak negara penjajah memang telah disengaja agar rakyat Indonesia menjadi lebih terbelakang dan bodoh-bodoh agar nantinya tidak merugikan mereka yang menjajah. Pada masa tersebut, tidak ada sekolah untuk rakyat yang bukan keturunan ningrat, sehingga rakyat Indonesia yang miskin sama sekali tidak ada kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan terjadilah buta aksara. Hal ini sama sekali tidak menguntungkan rakyat Indonesia sendiri, karena menjadikan penjajah makin lama menduduki Indonesia.

Buta aksara bukan sekadar tidak mampu membaca dan menulis, melainkan berpotensi menimbulkan serangkaian dampak yang sangat luas. Kesuksesan penuntasan buta aksara dapat meningkatkan indeks atau kualitas pembangunan manusia. Sebaliknya, kegagalan penuntasan buta aksara akan berdampak negatif, tidak hanya pada penurunan indeks pembangunan manusia, tetapi juga menjadi penghambat pembangunan pada sektor lainnya. Pemberantasan buta aksara tidak dapat langsung dilaksanakan. Namun memerlukan waktu dan perancangan program yang tepat.

Menurut Dirjen PLSP Depdiknas Fasli Jalal (2004), bahwa :

Buta aksara disinyalir menjadi salah satu penghambat suksesnya wajib belajar 9 tahun. Dan berdasarkan penelitian, kalau orangtua buta aksara, maka ada kecenderungan anaknya tak sekolah, jikapun sekolah, berpotensi untuk putus sekolah. Tinggi dan masih bertambahnya jumlah buta aksara karena masih ditemukan banyak siswa usia SD yang tidak sekolah atau putus sekolah. Putus sekolah anak SD ini, lanjutnya menjadi penyumbang terbesar bagi bertambahnya jumlah buta aksara di Indonesia karena menurut penelitian UNESCO, jika peserta pendidikan sekolah dasar mengalami putus sekolah khususnya ketika dia masih duduk di kelas I hingga kelas III, maka dalam empat tahun tidak menggunakan baca tulis hitungnya, maka mereka akan menjadi buta aksara kembali. Belum lagi masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki kesempatan untuk masuk sekolah karena

orang tua atau keluarganya tidak mampu. Kondisi ini memaksa orang tua untuk mempekerjakan anak mereka untuk mendatangkan pemasukan tambahan bagi keluarga. Indonesia dapat dikatakan negara yang tergolong cepat dalam pemberantasan buta aksara. Bahkan hal ini telah diakui oleh badan-badan dunia seperti UNESCO, UNICEF, serta WHO. Hal ini menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi pemerintah Indonesia khususnya. Oleh karena itu, setiap tahunnya pemerintah mempunyai target sendiri dalam upaya memberantas buta aksara.

Mengingat pentingnya penuntasan buta aksara, maka sejak tahun 1946 sampai kini Pemerintah RI memprogramkan pemberantasan buta aksara tersebut. Gerakan Pemberantasan Buta Aksara secara besar-besaran mulai dilakukan di bawah pemerintahan Presiden Soekarno. Program yang berlanjut dengan program belajar Paket A terintegrasi pendidikan mata pencaharian. Keberhasilan program ini ditandai dengan penghargaan dari UNESCO berupa Avicenna Award kepada Presiden Soeharto di tahun 1994. Pada tanggal 2 Desember 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendeklarasikan Gerakan Nasional Percepatan Pemberantasan Buta Aksara. Untuk mewujudkan hal itu, tahun 2006 keluar instruksi presiden nomor 5 tahun 2006 Gerakan Wajib Belajar 9 Tahun. Namun ternyata GPBA di Indonesia belum sepenuhnya menjangkau setiap daerah.

Masyarakat selaku pengguna jasa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta menjaga keberlangsungan penyelenggaraan proses pendidikan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional BAB IV yang didalamnya memuat bahwasannya pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Peran serta masyarakat / partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan . selain itu masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional, BAB III pasal 4 peran serta / partisipasi masyarakat dapat berbentuk:

1. Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah;
2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan pengajaran, pembimbingan dan/atau pelatihan peserta didik;
3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan;
4. Pengadaan dan/atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional;
5. Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis;
6. Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
7. Pengadaan dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar;
8. Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja;
9. Pemberian bantuan manajemen bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional;
10. Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan;
11. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan;
12. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan/atau penelitian yang diselenggarakan oleh Pemerintah di dalam dan/atau di luar negeri.

Sejak tahun 2014 di kabupaten Mamasa, tepatnya di desa Sibanawa kecamatan Sumarorong, terdapat sebuah kelompok pembelajaran keaksaraan yang diselenggarakan oleh pemerintah setempat. Hal ini disebabkan masih ada beberapa warga masyarakat yang buta aksara. Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran ini, bukan untuk pertama kalinya diadakan di desa Sibanawa namun pelaksanaan sebelumnya selalu kurang maksimal pada hasilnya dikarenakan kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti pembelajaran dengan berbagai alasan. Pada pelaksanaan tahun ini, pemerintah setempat sebagai penyelenggara mencoba mencari rasi belajar yang diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga agar mereka mau mengikuti pelaksanaan program pembelajaran keaksaraan. Salah satu aspek yang menarik dalam pemberian

ragi belajar ini, ialah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program. Tokoh masyarakat dapat menjadi motivator, mengingat posisi atau kedudukan seorang tokoh masyarakat didalam hidup bermasyarakat dipandang sebagai orang-orang yang berpengaruh sehingga warga masyarakat cenderung mendengar atau patuh pada saran-saran dari para tokoh masyarakat.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan , di desa Sibanawa diketahui bahwa di desa Sibanawa terdapat satu kelompok pembelajaran keaksaraan,dengan jumlah peserta didik tahun ini sebanyak 30 orang. Dan adapun tokoh masyarakat yang berperan dalam kegiatan ini ada 30 orang.

Berdasarkan keadaan tersebut di atas penulis bermaksud untuk meneliti tentang partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan keaksaraan di desa Sibanawa kabupaten Mamasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini dirumuskan menjadi, yakni Bagaimanakah partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan keaksaraan di desa Sibanawa Kabupaten Mamasa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan keaksaraan di desa Sibanawa kabupaten Mamasa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

- a. Bagi lembaga pendidikan, yakni untuk mengetahui keadaan pelaksanaan kegiatan pendidikan keaksaraan di lapangan.
- b. Bagi peneliti, yakni memberi kontribusi dalam peningkatan partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan keaksaraan.

2. Praktis

- a. Bagi penyelenggara keaksaraan di desa Sibanawa, yakni mengetahui partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan keaksaraan.
- b. Bagi masyarakat, yakni meningkatkan partisipasi tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan keaksaraan.

